



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

UNIT KERJA : KECAMATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **NADI BASWAN**
2. Jabatan : **SEKRETARIS KECAMATAN**
3. NHK : **645458**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 410.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 153 m2/80 m2 di KAB / KOTA KUTAI KARTANEGARA, HASIL SENDIRI Rp. 410.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 106.000.000**

1. MOBIL, DAIHATSU SIGRA STANDART R AT Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000
2. MOTOR, HONDA H1B02N42L0 A/T Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 11.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 5.000.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 4.650.000**

F. HARTA LAINNYA **Rp. ----**

Sub Total **Rp. 525.650.000**

III. HUTANG **Rp. 435.211.396**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp. 90.438.604**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

UNIT KERJA : KECAMATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AWANG
2. Jabatan : KEPALA SEKSI KEPERINTAHAN
3. NHK : 712142

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. ----

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 152.000.000

1. MOBIL, DAIHATSU XENIA-MINIBUS Tahun 2019, HASIL SENDIRI
Rp. 145.000.000
2. MOTOR, YAMAHA 2PV/SOLO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.
4.500.000
3. MOTOR, YAMAHA 2BJ/SOLO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.
2.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 25.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 3.782.139

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 180.782.139

III. HUTANG

Rp. 338.895.883

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. -158.113.744

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

UNIT KERJA : KECAMATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **RATNA HAYUNINGTYAS**
2. Jabatan : **KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM**
3. NHK : **680871**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.635.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 2.390 m²/48 m² di KAB / KOTA KUTAI KARTANEGARA, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
2. Tanah Seluas 7.500 m² di KAB / KOTA KUTAI KARTANEGARA, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 2.390 m²/140 m² di KAB / KOTA KUTAI KARTANEGARA, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 7.500 m²/64 m² di KAB / KOTA KUTAI KARTANEGARA, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 7.500 m²/128 m² di KAB / KOTA KUTAI KARTANEGARA, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 137.000.000**

1. MOBIL, AVANZA 1.5 VELOZ MINI BUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
2. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
3. MOTOR, HONDA TRAIL Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 15.000.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ---**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 500.000**



F. HARTA LAINNYA

Sub Total

Rp. ----
Rp. 1.787.500.000

III. HUTANG

Rp. 96.237.395

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.691.262.605

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

UNIT KERJA : KECAMATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : JUMEDI
2. Jabatan : KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL
3. NHK : 742180

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 255.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 280 m2/184 m2 di KAB / KOTA KUTAI KARTANEGARA, HASIL SENDIRI Rp. 255.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 34.500.000

1. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000
2. MOTOR, HONDA V1J02032L1 A/T Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 11.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 2.500.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 303.500.000

III. HUTANG Rp. 200.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 103.500.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

UNIT KERJA : KECAMATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ARSYAD
2. Jabatan : KEPALA SEKSI KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
3. NHK : 898719

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	50.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/60 m2 di KAB / KOTA KUTAI KARTANEGARA, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	7.000.000
1. MOTOR, YAMAHA SOLO Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	4.750.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	80.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	61.830.000
III. HUTANG	Rp.	45.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	16.830.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

UNIT KERJA : KECAMATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SIPA
2. Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN UMUM, KETATALAKSANAAN DAN KEPEGAWAIAN
3. NHK : 936567

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	300.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 125 m2/32 m2 di KAB / KOTA KUTAI KARTANEGARA, Rp. 300.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	----
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	190.322
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	300.190.322
III. HUTANG	Rp.	187.111.040
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	113.079.282

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

UNIT KERJA : KECAMATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MUHAMAD IDRUS**
2. Jabatan : **KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**
3. NHK : **961788**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 292.000.000

1. Tanah Seluas 198 m2 di KAB / KOTA KUTAI KARTANEGARA,
HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000
2. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA KUTAI KARTANEGARA,
HASIL SENDIRI Rp. 205.000.000
3. Tanah Seluas 173 m2 di KAB / KOTA KUTAI KARTANEGARA,
HASIL SENDIRI Rp. 32.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 102.750.000

1. MOBIL, TOYOTA RUSH 1.5 S Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.
90.000.000
2. MOTOR, HONDA SCOPY Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.
7.250.000
3. MOTOR, HONDA SCOPY Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp.
5.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 21.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 24.365.689

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 440.115.689

III. HUTANG Rp. 169.075.510

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 271.040.179



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.